



**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SYARIAH
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
OLEH BANK INDONESIA**

**(PROTECTION PUNISH THE CLIENT of BANK of MOSLEM LAW GO TOGETHER THE
OBSERVATION EXECUTION BY BANKINDONESIA)**

MAKALAH

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

R. RACH HARDJO BOEDI SANTOSO,SH

NIM. B.4A 096 079

PEMBIMBING

PROF. ABDULLAH KELIB,SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**



**KUM NASABAH BANK SYARIAH
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
OLEH BANK INDONESIA**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum**

Semarang, 19 Januari 2009

Dosen Pembimbing

Penulis

PROF. ABDULLAH KELIB,SH
NIP.130.354.857

R. RACH HARDJO BOEDI SANTOSO,SH
NIM.B4A.096.079

**Mengetahui ,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

Prof. DR. Paulus Hadi Suprpto,SH,MH
Nip.130531702

ABSTRACT

g system in the society is the power of the g in Indonesia. The change of paradigm include ues. In banking, especially, the change of belief using interests to share distribution system have n by Islamic society with the term of Mudharobah ion that has been developed since 1963 in Egypt.

Meanwhile, in Indonesia, it began to be developed into a banking system since 1991 with the establishment of Bank Muamalat Indonesia.

In relation to that matter, the observed problems are how the legal protection for the customers of syariah banks is and how the execution of monitoring upon syariah banks conducted by the Bank of Indonesia in relation to the legal protection for the customers of syariah banks in Semarang.

Based on the mentioned background, this research uses the juridical-normative research method with secondary data to analyze legal relations between the banks and creditors and also legal protection for customers, and to compare the conventional banks and syariah banks and also the consequences of monitoring conducted by the Bank of Indonesia.

Changes of banking system should be guarded by regulations of law in one side, meanwhile, the other side is the monitoring upon that banking system itself.

The monitoring process is conducted by the Bank of Indonesia as the Central Bank. The objective of monitoring is to provide a guarantee of the fulfillment of **obedience to the principles of syariah in all banking activities**. Since 1992, it has begun from the legalization of Act No. 7 Year 1992 to the establishment of Act No. 21 Year 2008, there have been several changes in banking regulations. One of the important parts in those regulations is the protection for the customers of syariah banks.

From the law of agreement point of view, the regulation concerning the protection for bank customers is regulated in the Act Number 8 Year 1999 concerning Customer Protection (Customer Protection Act). Meanwhile, from the banking mechanism point of view, the regulation is regulated in banking regulation, both through the Acts and the Regulation of Bank of Indonesia.

Then, from this research, a conclusion is drawn that the main activities of syariah banks are collecting funds and credit distribution using the principles of syariah and also their development in facing globalization with business activities in marketable securities in money market and providing invormation services of business opportunities to the customers, thus, they are able to compete in attracting customers with other banks because they have specifications in customers' business. Besides that, the implementation of monitoring by the Bank of Indonesia as the monetary and banking authority is the primary foundation for the success of nation in maintaining the national economic system in order to realize national objectives to create prosperous life for Indonesian people as mentioned in the 1945 Constitution.

In relation to the mentioned conclusion, therefore, as the follow-up to face the competition in system globalization, Bank of Indonesia, in conducting monitoring upon banking systems especially syariah banking, should optimize the observation of agreements more because the initial agreements are the basic of Bargaining Position appointment between parties, and the implementation of national policy should be focused more on socialization and development of syariah monetary system, thus, the society will enjoy its positive impacts because all parties obtain bargaining positions.

Keywords: legal protection, customers of syariah banks, monitoring

Abstrak

perbankan di masyarakat merupakan kekuatan di Indonesia. Perubahan paradigma meliputi nilai. Di bidang perbankan khususnya telah terjadi nilai transaksi dengan sistem Riba menjadi asil. Sistem ini dikenal masyarakat Islam dengan lembaga perbankan yang dikembangkan sejak tahun 1983 di Mesir. Sedangkan di Indonesia mulai dikembangkan menjadi sistem perbankan sejak tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

Berkenaan dengan itu, permasalahan yang akan dilakukan penelitian adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah dan Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah pada bank syariah di Semarang.

Berdasarkan latar belakang dimaksud, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan data sekunder untuk menganalisa hubungan hukum antara bank dengan kreditur serta perlindungan hukum nasabah, dan membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah serta konsekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Perubahan sistem perbankan harus dikawal dengan regulasi oleh hukum di satu pihak, sementara adanya pengawasan oleh sistem perbankan itu sendiri di lain pihak.

Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Tujuan dari pengawasan adalah adanya jaminan pemenuhan **ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank**. Sejak tahun 1992, dimulai dengan UU No. 7 Tahun 1992 sampai dengan terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 telah terjadi proses perubahan pada regulasi perbankan. Salah satu bagian yang penting dalam regulasi itu adalah perlindungan terhadap nasabah Bank Syariah.

Dari sudut pandang hukum perjanjian, regulasi mengenai perlindungan nasabah Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sedangkan dari sudut pandang mekanisme perbankan, regulasinya diatur dalam peraturan perbankan, baik melalui Undang-undang maupun melalui peraturan Bank Indonesia.

Selanjutnya dari penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan utama bank syariah menghimpun dana dan penyaluran kredit dengan prinsip syariah serta pengembangannya dalam menghadapi globalisasi dengan kegiatan usaha di bidang surat berharga di pasar uang dan membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah sehingga mampu berkompetisi dalam menjaring nasabah dengan bank lain karena memiliki spesifikasi dalam urusan bisnis nasabah. Di samping itu, implementasi pengawasan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan merupakan fundamen yang utama bagi keberhasilan pengembangan bank syariah karena Bank Sentral adalah fundamen keberhasilan negara dalam menjaga sistem perekonomian nasional dalam mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan kesimpulan dimaksud maka sebagai tindak lanjut untuk menghadapi kompetisi dalam globalisasi sistem, Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan khususnya bank syariah agar lebih mengoptimalkan dalam pengkajian perjanjian karena perjanjian awal sebagai dasar penunjukan Bargaining Position antar pihak, dan implementasi kebijakan negara lebih difokuskan pada sosialisasi dan pengembangan sistem keuangan syariah sehingga masyarakat akan menikmati dampak positifnya karena semua pihak mendapatkan bargaining position.

Kata kunci : perlindungan hukum, nasabah bank syariah dan pengawasan

s Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia

masyarakat Islam Indonesia, sedang merubah paradigmanya terhadap hukum Islam, dari paradigma agama yang melihat hukum Islam hanya bagian dari agama Islam di Indonesia, menjadi paradigma hukum yang bersifat lebih luas, yang melihat hukum Islam bukan hanya sebagai bagian dari agama Islam melainkan juga **bagian dari hukum Nasional Indonesia**. Sebagai contoh perubahan di bidang ekonomi yang dimulai dengan perubahan perilaku perbankan, dari penggunaan bank yang berbasis *riba* menjadi bank berbasis *anti riba*, yaitu dengan lahirnya Bank-bank Syariah di Indonesia.

Perilaku ekonomi dalam bidang perbankan di Indonesia juga mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman. Perbankan Konvensional yang transaksinya berdasarkan pada *riba*, tidak demikian saja ditutup atau serta merta dihapuskan¹, melainkan dirubah secara perlahan dengan memberi perbankan alternatif yang halal yang tujuannya adalah melakukan perubahan struktural /paradigmatis dalam pemikiran masyarakat di Indonesia dari bank dengan dasar *Riba* menjadi Bank Anti *Riba*. Hal itu terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang pluralistik di bidang agama.

Dalam konteks inilah kemudian terjadi perubahan paradigma perbankan dari sistem *riba* yang merupakan ahlak yang dilarang menjadi sistem bagi hasil yang merupakan ahlak yang diperintahkan Allah. Perubahan paradigma ini tidak terlepas dari proses Globalisasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

2. Perubahan Sistem Perbankan dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Suatu hal yang patut kita banggakan dari pembuat Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah, mereka telah berhasil menyelipkan ketentuan-ketentuan Perbankan dengan prinsip Syariah, sehingga perkembangan dan pengembangan perbankan di Indonesia semakin kompetitif dan sampai pada saatnya terbit UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maka sejak saat itu di Indonesia mengenal **Dual Banking System** yaitu bank konvensional dan bank bagi hasil.

Pengawasan sistem perbankan syariah berkaitan dengan keunikan Perbankan Syariah, yaitu **pada fungsi dasar bank syariah** secara umum **sama** dengan bank

¹ Seperti penghapusan perbudakan pada jaman rosululloh.

umum pengaturan dan pengawasan bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup bank syariah menuntut adanya perbedaan bagi bank syariah². Aspek hukum yang penting bank dengan nasabahnya adalah perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen perbankan. Perundang-undangan di Indonesia mengakomodir masalah perlindungan hukum nasabah dari dua sisi, yaitu dari sisi perjanjian perbankan dan dari pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral.

B. PERMASALAHAN

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah di Semarang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah pada Bank Syariah di Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah di Semarang .
2. Untuk memahami Pelaksanaan Pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia di Semarang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi departemen atau lembaga terkait dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, untuk membandingkan antara bank konvensional dengan bank prinsip syariah dalam menghimpun dana, memberikan perlindungan hukum, dan pelaksanaan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia., serta nasabah/kreditur sebagai pengguna jasa bank tersebut.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi peneliti dalam menerapkan dan mengembangkan teori yang telah diperoleh.

² Situs BI, [www: Pengawasan Perbankan - Bank Sentral Republik Indonesia.htm](http://www.PengawasanPerbankan-BankSentralRepublikIndonesia.htm)

di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 diubah menjadi No.10 tahun 1998 dinyatakan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴ Perbankan di Indonesia menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan prinsip operasionalnya menggunakan prinsip Konvensional dan prinsip Syariah.

2. Definisi

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari **perbankan nasional** yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001)⁵, Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono (2004)⁶, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian dapat dirangkum definisi Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengesahkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Pengertian Mudlarabah dan Musyarakah menurut Abdullah Saeed adalah:

Mudlarabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut

³ ibd

⁴ Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah UU No.10 tahun 1998,Urusan Hukum Bank Indonesia, Jakarta, hal.6

⁵ Schaik, D., "Islamic Banking", The Arab Bank Review, 3 (1),2001: hal. 45-52.

⁶ Sudarsono, H., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia: Yogyakarta,2004. hal.55

tagang.⁷ Musyarakah (kemitraan) adalah dasar Cross Sharing dalam perbankan Islam. Musyarakah hanya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya, syarat-syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak tersebut kepada pihak lain.⁸

3 Dasar Hukum Bank Syariah

a. Dasar hukum normatif

Dari sisi eksistensinya, Hukum Islam di Indonesia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hukum yang bersifat normatif dan hukum yang bersifat formal. Keduanya merupakan hukum positif di Indonesia, karena berlakunya bersifat yuridis normatif, yaitu di dasarkan pada peraturan perundang -undangan, dan bersifat yuridis formal, yaitu berlaku ditunjuk oleh perundang-undangan atau sudah menjadi perundang-undangan.

b. Dasar hukum formal

Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD 1945 pasal 29, Ketentuan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya mengandung tiga makna⁹, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di ubah dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, KUH Perdata pasal 1338 bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk BPRS yaitu Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative¹⁰ Karena penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisa hubungan hukum antara bank dengan para kreditur serta aspek perlindungan hukumnya dan,

⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Paramadina, Jakarta, 1996. hal.77

⁸ Ibid. hal.89-90.

⁹ Agustianto, Opini Republika 4 Februari 2008

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, h. 14.

konvensional dengan prinsip syariah. Pendekatan analisa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank masyarakat.

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis¹¹, karena dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dari teori dan konsep-konsep mengenai perlindungan hukum, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank (konvensional dan prinsip syariah), khususnya dalam menghimpun dana masyarakat, karena penelitian ini juga menganalisa aspek perlindungan hukum kepada para kreditur, melalui perangkat hukum perbankan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah kota Semarang, karena Semarang merupakan Ibukota propinsi Semarang Jawa Tengah yang dikenal sebagai kota dagang, sebagai daerah perdagangan maka banyak sarana dan prasarana penunjang dalam mengembangkan dunia usaha, salah satunya adalah bank prinsip syariah yang merupakan salah satu focus dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan data.

Sejalan dengan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode guna mendapatkan data. Sumber data yang diperlukan penelitian ini, adalah data sekunder, yaitu data pustaka dari Bank Indonesia.

5. Metode Analisa Data

Pengertian analisa diartikan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, hasil pengumpulan data ini akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif normatif. Sehubungan dengan analisis tersebut diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan teori *Correspondence Theory*, yaitu dengan melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam berdasarkan perundang-undangan dan teori – teori untuk mengungkapkan keabsahan data yang diperoleh yang merupakan fakta dan saling berhubungan sebagai konsekuensi kebenaran pernyataan data.¹²

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 1991.h.197

¹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.17.

dan keakuratan data, maka digunakan teknik yang menjabarkan ke dalam tujuan, prosedur umum, an interogasi data dan langkah penafsiran data analisis kualitatif normatif serta pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai akurasi kenyataan data.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di Bank Indonesia Semarang, dihasilkan penelitian sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah

1. Sumber-Sumber dana

Untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu ditelusuri melalui sumber-sumber data yang dikelola oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia yang merupakan lembaga Independent sebagai Bank Sentral yang memiliki tanggung jawab salah satunya sebagai pengawas dan pembina bank dapat dijadikan sumber yang sentralistik pada saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Jawa Tengah tahun 2005 total asset bank meningkat Rp70,982 Milyar, kredit sebesar Rp46.470 Milyar dan dana pihak ketiga sebesar Rp56.931 Milyar, sedangkan tahun 2006 sebesar Rp83.361 Milyar, p52.446 Milyar dan Rp66.777 Milyar. Selanjutnya tahun 2007 menjadi sebesar Rp93.197 Milyar, Rp62.333 Milyar dan Rp74.783 Milyar.

Hal tersebut mencerminkan sumber dana dan perkembangan perbankan di Jawa tengah meningkat dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai biaya pembangunan dan sarana intermediasi bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Sumber dana tersebut didapatkan dari masyarakat yang menanamkan dananya di perbankan dan dari lembaga keuangan lainnya yang memiliki kerja sama/linkage program.

2. Linkage Program

Bank sebagai sarana lembaga intermediasi memiliki kerja sama dengan lembaga lain untuk menjaga system keuangan Negara ini, yaitu dengan linkage program adalah suatu kerja sama bank dengan lembaga lain untuk mengelola dana yang dapat digunakan masyarakat sehingga system perekonomian akan berkelanjutan. Linkage Program tersebut berjalan antara BPR dengan Bank Umum yang bersifat kemitraan yang mana meningkatkan sector UMKM.

tahui dalam praktek perbankan. Nasabah bank : nasabah penyimpan dana/kreditur, nasabah pengguna jasa bank. Dalam kegiatan usaha bank yang melakukan hubungan hukum dengan bank.

B. SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH

Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU dan perundang-undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di dalam perbankan syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral.

1 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen

UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (umbrella act) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.

2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undang di Bidang Perbankan

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (Law as a tool of social engineering) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, adalah wewenang pengawasan oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan, kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

a. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. **Kewenangan memberikan izin** (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.
2. **Kewenangan untuk mengatur** (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. **Kewenangan untuk mengawasi** (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*).
4. **Kewenangan untuk mengenakan sanksi** (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

b. Program Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia (BI)

Dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia (BI) mencanangkan program-program pengawasan dengan tujuan sebagai berikut: "Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko"

Bank Indonesia (BI) membuat konstruksi perlindungan hukum nasabah dengan membuat program praktis perbankan melalui mekanisme perbankan. Tujuan dari perlindungan hukum melalui mekanisme perbankan adalah meliputi : 1. untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme

SABAH BANK SYARIAH BERDASARKAN PERBANKAN.

Menurut UU No.21 Tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

1. Aturan dan mekanisme pengesahan dari otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah,

Otoritas fatwa tentang kehalalan / kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 - Komite Perbankan Syariah, , merupakan aturan dan mekanisme pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk perbankan syariah.

Secara normatif peraturan BI di atas mengandung norma hukum yang harus ditaati untuk mencapai ketertiban hukum, karena pada prinsipnya tujuan sebuah pengaturan adalah untuk mencapai ketertiban. Oleh karena itu pelanggaran terhadap mekanisme yang sudah diatur adalah hilangnya ketertiban hukum yang secara konstruktif dibangun untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya, mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006.

2. Sistem Pengawasan Yang Memantau Transaksi Keuangan Bank Sesuai Dengan Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Fatwa Perbankan Serta Mekanisme Penetapan Opini Syariah Compliance.

Karakteristik Operasional perbankan syariah secara ideal memiliki ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun dalam kegiatan financing. Akad yang lazimnya digunakan adalah mudarabah dan musyarakah. Dalam hal ini, manajemen bank syariah bertindak selaku mudarib [agent] dari dua pihak sekaligus yaitu pemilik bank dan deposan (investor) yang memiliki hak yang

menimbulkan konflik kepentingan dari manajemen bank pihak. Kontrak mudharabah adalah instrumen hukum yang hak dari deposan (investor) tersebut tidak dimiliki oleh bank konvensional ataupun pemegang saham.

dan Pengawasan menurut Undang-undang

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Mekanisme perbankan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1 Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

2 Tugas Mengatur Dan Mengawasi Bank

Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Psl. 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Psl. 25). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Psl. 27).

D. PERLINDUNGAN NASABAH BANK SYARIAH BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN BANK INDONESIA (BI)

1. Fungsi Kontrol (Pengawasan) Bank Indonesia terhadap Perbankan Syariah berkaitan dengan Perlindungan Nasabah.

Fungsi Kontrol (pengawasan) Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Syariah adalah **Perlindungan Nasabah Bank Syariah**, diwujudkan dalam berapa hal, yaitu:

- a. Melakukan Pengaturan Perbankan.
- b. Melakukan Pengawasan berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

(1) Bank Indonesia (BI) terhadap bank syariah dalam diprogramkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai program umum untuk semua bank maupun hal-hal yang berkaitan dengan bank syariah. Secara umum pengawasan terhadap perbankan dilakukan pada perbankan konvensional, yaitu berdasarkan pada Program pengawasan Bank Indonesia (BI) terhadap seluruh perbankan di Indonesia.

2. Tujuan Pengaturan Dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai, Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan: kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*), dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

3. Perlindungan Nasabah Bank Syariah Dengan Program Pengaturan Perbankan Oleh Bank Indonesia

BI sebagai subyek pengawasan telah merancang program pengawasan melalui sebuah lembaga yang disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang bertugas menyusun program, target dan skedul pelaksanaan pengawasan perbankan pada periode tertentu. Di samping menyusun program pengawasan, API juga membuat pengaturan yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank yang dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2010.

an Terhadap Nasabah Bank Syariah

kegiatan usaha bank syariah yaitu bank wajib prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha bank yang merupakan sumber pendapatan lainnya yang sangat potensial pada era globalisasi adalah perdagangan surat berharga di pasar uang, pasar modal serta mengembangkan jasa pelayanan terhadap nasabah yang lebih inovatif antara lain membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah, membantu menyusun administrasi nasabah. Dalam kegiatan tersebut bank semakin mampu bersaing dalam menjaring nasabah dengan bank lain karena memiliki spesifikasi dalam meningkatkan urusan bisnis nasabah.

2. Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bank Indonesia

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau deposito merupakan perjanjian antara pemberi dana/penanam dana dengan bank sebagai pengelola dengan prinsip PLS /bagi hasil dan konsekuensi masing-masing pihak. Dalam KUH Perdata pasal 1765 merupakan cermin perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabah, sedangkan nasabah penyimpan dana atau deposito hanya bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan apabila nasabah deposito percaya bahwa bank yang bersangkutan mampu untuk membayar kembali dana itu apabila ditagih.

Selanjutnya dalam sistem bank syariah, Pengertian Mudharabah dan Musyarakah sebagai berikut ;

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan usaha dagang. Musyarakah (kemitraan) adalah dasar kedua dari konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan Islam. Musyarakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya, kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain.

Selain itu dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditetapkan dengan dimensi hukum memandang nasabah sebagai konsumen perbankan.

Berdasarkan hal tersebut bahwa keunikan tersendiri bank dengan prinsip syariah memiliki kandungan filosofis yang sangat tinggi karena dengan adanya bargaining position antar pihak menjadikan nuansa bisnis yang melalui perbankan

dan nyaman karena pihak-pihak tersebut sepakat
yang akan diterima.

adalah mengetahui kegiatan usaha perbankan yang
melindungi nasabah bank syariah yang berkaitan dengan pengawasan oleh Bank
Indonesia dan berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis, penulis
menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pengawasan dan pembinaan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia lebih dioptimalkan pada proses hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah yang meliputi perjanjian antar pihak sehingga bargaining position merupakan hal yang substantial, karena perjanjian tersebut sebagai dasar tindak lanjut proses perbankan dapat berjalan sebagai fondasi perekonomian Nasional.
- 2 Kebijakan pemerintah dan Negara dalam memposisikan perbankan syariah khususnya lebih difokuskan pada sosialisasi dan pengembangan system keuangan syariah sehingga masyarakat akan menikmati dampak positifnya karena semua pihak mendapatkan bargaining position.
- 3 Perlindungan Nasabah agar diberikan sejak dini yakni dengan adanya informasi keberadaan bank syariah secara informative, sehingga dalam berkompetisi dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi yang suitable dan acceptable. Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan baik dengan memberikan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek.
- 4 Mendorong dan memotivasi pemerintah dan Negara untuk mengembangkan dunia perbankan syariah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan.
- 5 Perlu tindak lanjut atas perjanjian awal yang memiliki bargaining position dapat diakomodir oleh Undang-Undang Perbankan Syariah.



Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank, Jakarta, 1996.

Manajemen Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dawan Rahardjo M dkk, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995.

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Pereasuransian*, Syariah Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Latifa M.Alqaoud, Mervyn K.Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik*, Prospek. Serambi, Jakarta 2003.

Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, 2002.

Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Muhammad, Alimin, *Etika Perlindungan konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Muhamad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1994.

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Muhammad Muslehudin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Bineka Cipta, Jakarta, 2004.

Mulya E.Siregar Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia, Bogor, 2004.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.

Nasution S, M.Thomas, *Buku Penuntun Membuat, Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.

Nazri Adlay.H.A, Hanafie Tamam.H, Faruq Nasution.H.A, *Alquran Terjemahan Indonesia*, Sari Agung, Jakarta, 1999.



Olis Salman S. Anton F. Suwanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan* ...na, Bandung, 2004.

Alitaf, *Dasar-dasar Dan Aplikasi*, Y3A , Malang,

at Penelitian Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Scaik,D., “Islamic Banking” The Arab Bank Review, 2001.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

Sofyan S.Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPTE-Usakti,Jakarta,2005.

Sudarsono,H., *Bank Dan Lembaga Keuangan SYariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2004.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta,2003.

Sunaryati Hartono.C.F.G, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Sunaryo Hartono, *Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Nasional*, Analisa CSIS, Tahun XXII No.1 Tahun 1993.

Suteki,*Hak atas air*,Pustaka Magister,Semarang, 2007.

Suteki, *Hukum dan Transformasi Global*, Pustaka Magister,2007.

Widjanarko, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993.

Yusuf Al-Qardhawi, *Hikmah Pelarangan Riba*, Media Eka Sarana, Jakarta, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.

UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998.

UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004.

UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Himpunan Peraturan Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta, 2004.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,2008.



Februari 2008.

angan & Distribusi bagi hasil Bank Syariah, IBI, Jakarta, 2002.

Jafril Khalil, *Aqad-aqad Produk Keuangan Islam*, IBI, Jakarta, 2002.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, IAI, Jakarta, 2002.

Konsep Dasar Sistem Ekonomi Islam, IBI, Jakarta, 2002.

Konsep Riba Dan Interest Menurut Islam, IBI, Jakarta, 2002.

Maulana Ibrahim, Simposium Nasional Ekonomi Islami di Malang, 2005.

Situs BI. [www: Pengawasan Perbankan-Bank Sentral Republik Indonesia.htm](http://www.Pengawasan Perbankan-Bank Sentral Republik Indonesia.htm).